

SINERGI PEMERINTAH KOTA DAN BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Meraih
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah**



**Oleh:
AMBAR PALUPI
NIM: 105180118**

**Pembimbing:
Dr. Kholil, S.Ag., M.Ag
Nofi Nurman, S.Pd., M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SINERGI PEMERINTAH KOTA DAN BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Meraih
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah**



Oleh:
AMBAR PALUPI
NIM: 105180118

Pembimbing:
Dr. Kholil, S.Ag., M.Ag
Nofi Nurman, S.Pd., M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 05 Agustus 2022

Peneliti

Hus

Ambar Palupi

105180118





**KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN







Skripsi yang berjudul “Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangunan Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.



Dekan Fak. Syariah

Ura, S.Ag., MH
201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: <u>Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, SH.M.H</u> NIP. 196509292005011005	()
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Choiriyah</u> NIP. 196605081994032001	()
Penguji I	: <u>Dr. Hj. Rahmi Hidayati, S.Ag. MHI</u> NIP. 197112201992032001	()
Penguji II	: <u>H.M. Mustajab, Lc., M.H</u> NIP. 199109142020121011	()
Pembimbing I	: <u>Dr. H. Kholil Syuaib., S.Ag., M.Ag</u> NIP. 197207032007101003	()
Pembimbing II	: <u>Nofi Nurman, M. Si</u> NIDN. 2010118703	()

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar
(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan
haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu)
para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida
Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram),
berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu
kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam,
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya

(QS AL-MAIDAH : 2)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas karunia-mu yaa Allah, yang telah melimpahkan rahmat-nya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta kepada Ayahku Sukarman dan ibuku Ida Nurwati. Engkau yang menjadi tujuan hidupku yang selalu memberikan semangat, berkat doa siang dan malam pengorbanan tanpa mengenal lelah dan dukungan yang kuat serta bantuan moril dan materil beliau berdua saya dapat menyelesaikan studi saya di perguruan tinggi UIN STS Jambi.

Dan saya persembahkan kepada adik kandung saya tersayang Aqni Nurhalizah yang telah mendukung saya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan juga untuk diri saya sendiri karena sudah mampu untuk menyelesaikan tanggung jawab pendidikan di saat semua tekanan dan cacian, terimakasih sudah mengajarkan saya arti sulitnya menuntut ilmu.

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga besar saya, dan teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian skripsi ini saya persembahkan juga untuk para sahabat dan teman-teman terdekat saya yang sudah memberi arahan, masukan, serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Ambar Palupi
NIM : 105180118
Judul : Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kota Jambi, seperti permodalan, persaingan usaha, kualitas manajemen dan permasalahan digital, sehingga dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan perbankan terutama BI untuk bersinergi membangun UMKM di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengetahui bagaimana sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dari sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, dengan sumber data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak Pemda Kota Jambi dan BI. Hasil penelitian ini adalah: (1). Landasan hukum sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi terbangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi. Dalam proses komunikasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dilakukan dengan berbagai media, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sedangkan proses koordinasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam upaya pembangunan Kota Jambi dilakukan dengan cara melakukan pembagian tugas antara masing-masing agar terjalin kerjasama dan tujuan yang bersinergi. Tugas BI sebagai hasil dari koordinasi tersebut adalah sebagai lembaga stimulus permodalan, pendampingan dan pembinaan UMKM, sementara tugas Pemda adalah melakukan riset terkait potensi dan kelayakan UMKM serta pengembangannya. Hasil dari koordinasi tersebut juga adalah dilansirnya sejumlah nama UMKM yang layak untuk dibiayai, dibina dan didampingi, yang berjumlah 618 UMKM untuk Provinsi Jambi. (2) Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam membangun sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI. Secara faktor internal, segala proses dalam komunikasi dan koordinasi antara Pemda Kota Jambi dan BI relatif berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Sedangkan dari faktor eksternal, hambatan utama dalam sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI adalah adanya kendala pada eksternal dari perilaku UMKM dalam hal kredit macet dan kurangnya partisipasi dalam pelatihan, pembinaan dan pengembangan UMKM oleh pihak BI.

Kata Kunci: *Sinergi, Pemda Kota Jambi, Bank Indonesia, Pembangunan Kota Jambi*

ABSTRACT

Nama : Ambar Palupi
NIM : 105180118
Judul : Synergi between the city government and the Indonesian bank in realizing the development of the city of Jambi

Abstract: This research is motivated by the existence of a number of problems faced by MSMEs in Jambi City, such as capital, business competition, quality management and digital problems, so that an active role is needed from the government and banking, especially BI to synergize to build MSMEs in Jambi City. This research aims: (1). To find out how the city government and Bank Indonesia synergize in realizing the Jambi City builder. (2) To find out the inhibiting factors of the synergy between the city government and Bank Indonesia in realizing the Jambi City development. The research method that the author uses is a qualitative method, with data sources in the form of observation, documentation and interviews with the Jambi City Government and BI. The results of this study are: (1). The legal basis for the synergy between the Jambi City Government and BI in the development of Jambi City is based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017 and Law Number 25 of 2004. The synergy between the Jambi City Government and BI in the Jambi City development is built in two ways, namely communication and coordination. In the process of communication between the Jambi City Government and BI, it is carried out with various media, either directly or indirectly. Meanwhile, the coordination process carried out between the Jambi City Government and BI in the Jambi City development effort is carried out by dividing the tasks between each so that cooperation and synergistic goals are established. BI's task as a result of this coordination is to act as a capital stimulus institution, assisting and fostering MSMEs, while the task of the Regional Government is to conduct research related to the potential and feasibility of MSMEs and their development. The result of the coordination was also the launch of a number of names of MSMEs that were eligible to be financed, fostered and assisted, totaling 618 MSMEs for Jambi Province. (2) There are a number of obstacles faced in building synergy between the Jambi City Government and BI. Internally, all processes in communication and coordination between the Jambi City Government and BI were running relatively well and without any problems. Meanwhile, from external factors, the main obstacle in the synergy between the Jambi City Government and BI is the existence of external constraints from MSME actors in terms of bad loans and the lack of participation in training, coaching and development of MSMEs by BI.

Keywords: *Synergy, Jambi City Government, Bank Indonesia, Jambi City Development.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan petunjukNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing umat-Nya kejalan islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat menempuh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi dengan judul **“Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi”**.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.H.Su'aidi, M.A.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I., MA., M.IR selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si., MSHS dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum, Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Bapak Dr. Kholil, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I

7. Nofi Nurman, S.Pd., M.Si selaku Pembimbing II

8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tulis satu-satu.

Semoga atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis merupakan berkat dan karunia dari Allah Swt, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi teknis penulisan analisis maupun dalam mengagungkan adanya tanggapan dan masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan mahasiswa/i, khususnya Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN MUNAQSAH	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	viiix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Teori.....	16
B. Kerangka Operasional.....	21
C. Kerangka Konseptua	27
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Kota Jambi.....	30
B. Gambaran Umum Bank Indonesia Provinsi Jambi	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi	40
B. Faktor Penghambat Dari Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam Mewujudkan Pembangun Kota Jambi	69
BAB V	77
PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data UMKM Di Kota Jambi Yang Potensial Menurut Bank Indonesia

Tabel 1.2 Informan Penelitian

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Di Kota Jambi

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2021

Tabel 3.3 Angka Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2019 – 2021

Tabel 3.4 Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kota Jambi Tahun 2021

Tabel 4.1 Data UMKM Di Kota Jambi Yang Potensial Menurut Bank Indonesia

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.¹ UMKM merupakan kategori usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan.² Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern.³

Salah satu Provinsi di Indonesia adalah Jambi yang tengah berada pada tahap pengembangan ekonomi. Provinsi Jambi memiliki tantangan pembangunan yang meliputi jumlah penduduk yang terus meningkat dan keragaman masyarakat dalam pendidikan, ekonomi dan sosial. Salah satu sektor penggerak perekonomian Provinsi Jambi adalah sektor UMKM. Jumlah UMKM di Provinsi Jambi mencapai 167 ribu UMKM,⁴ yang terdiri dari sektor perdagangan besar dan

¹ Onan Marakali Siregar Dkk, *Penerapan Bisnis Model Canvas Sentral UMKM*, (Medan: Purpantara, 2020), hlm. 3.

² Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri, *Sistem Ekonomi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 40.

³ Rachmawan Budiarto Dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 4.

⁴ BPS Provinsi Jambi, *Potensi Usaha Mikro Kecil Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Jambi*, (Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2017), hlm. 4.

eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 53,9 persen, sektor penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum sebesar 15,56 persen, sektor industri pengolahan sebesar 9,6 persen, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi sebesar 6,57 persen, sektor aktivitas jasa sebesar 3,46 persen, sektor pendidikan sebesar 3,1 persen, sektor real estate sebesar 1,99 persen.⁵

Jumlah UMKM tersebut tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dengan jumlah tertinggi berada di Kota Jambi dengan persentase 20 persen. Diantaranya: Kota Jambi 59.874 UMKM, Kabupaten Muaro Jambi 26.207 UMKM, Kabupaten Batanghari 22.192 UMKM, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 19.238 UMKM, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 26.036 UMKM, Kabupaten Tebo 30.071 UMKM, Kabupaten Bungo 30.580 UMKM, Kabupaten Sarolangun 24.095 UMKM, Kabupaten Merangin 30.997 UMKM, Kabupaten Kerinci 27.823 UMKM dan Kota Sungai Penuh 13.662 UMKM.⁶

Kota Jambi adalah satu kota yang tengah berkembang secara ekonomi, dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jambi dengan jumlah 59.874 UMKM. Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan jumlah penduduk Kota Jambi adalah 606.200 jiwa,⁷

⁵ BPS Provinsi Jambi, *Potensi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Provinsi Jambi*, (Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2017), hlm. 6.

⁶ BPS Provinsi Jambi, hlm. 23.

⁷ BPS Kota Jambi, *Loc, Cit.*



Pandemi Covid 19 berdampak terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota Jambi. Pendapatan UMKM sektor jasa, berkurang hingga 90%. Sebelum Covid 19, pendapatan mereka berkisar antara 5 juta sampai 6 juta perbulan, namun setelah Covid melanda, pendapatan mereka hanya 500 ribu per bulan. Pendapatan UMKM sektor kuliner menurun drastis. Sebelum Covid 19, pendapatan mereka berkisar antara 21 juta sampai 30 juta perbulan, namun sejak Covid 19, pendapatan mereka menurun hingga 1,5 juta hingga 3 juta per bulan.⁸

Masalah lain yang dihadapi UMKM di Kota Jambi adalah masalah permodalan yang berpengaruh terhadap jalannya suatu usaha. Selain permasalahan modal, permasalahan lain yang dihadapi adalah persaingan usaha, pemasaran, bahan baku atau barang dagangan, infrastruktur, tenaga kerja, bahan bakar minyak dan energi, peraturan pemerintah dan birokrasi serta permasalahan pungutan liar. Namun dari sekian permasalahan yang ada, permasalahan modal merupakan masalah utama yang dihadapi UMKM di Kota Jambi, yaitu 54,62 persen UMKM di Kota Jambi menyatakan terkendala dengan permodalan.⁹

Masalah permodalan yang dihadapi UMKM di sejumlah wilayah di Jambi akan berdampak pada pertumbuhan UMKM itu sendiri, dan lebih lanjut pada pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini karena modal merupakan faktor utama dalam menunjang keberlangsungan suatu usaha bagi UMKM yang telah berjalan, dan modal awal dalam menjalankan usaha bagi UMKM yang baru akan berdiri.¹⁰

⁸ Arif Laksana, *Analisis Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Covid 19 Di Kota Jambi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, (Jambi: UIN Jambi, 2021), hlm. 69.

⁹ BPS Provinsi Jambi, hlm. 55.

¹⁰ Edy Dwi Kurniati, *Kewirausahaan Industri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 116.



Peran pemerintah dan lembaga keuangan mutlak dibutuhkan untuk mempertahankan keberadaan UMKM, dan secara tidak langsung sebagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Peran ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau lembaga keuangan dengan penyaluran pembiayaan untuk modal usaha, pemerintah bisa menyalurkan pemodalannya secara langsung melalui lembaga pemerintahan yang ada, atau membuat regulasi yang menguntungkan UMKM.

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia. Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Bank Indonesia memiliki posisi sebagai salah satu lembaga negara yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki kewenangan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia berwenang untuk mengeluarkan alat bukti pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam melakukan tugasnya masing-masing Bank Indonesia dan pemerintah memiliki hubungan kerja yang erat yaitu hubungan keuangan dan koordinasi kebijakan.¹¹

Koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintah pada program stabilitas ekonomi yang mencakup berbagai kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat makro maupun mikro, meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil serta melibatkan lembaga pemerintah, Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait. Pada program pembangunan secara makro meliputi kegiatan perekonomian secara

¹¹ M.Juhro Solikin, *pengantar kebanksentralan Teori dan Kebijakan*, (Depok:Rajawali Pers,2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menyeluruh atau secara luas seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain-lain. Sedangkan program pembangunan secara mikro hanya meliputi individu, kegiatan ekonomi seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan menguraikan pada bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti harga, biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, teori produksi, elastisitas, dan lain-lain.¹²

Dalam upaya menunjang pembangunan di daerah Jambi, BI bersinergi dengan Pemerintah Daerah Jambi dengan merevitalisasi fungsi dan peran kantor BI di daerah agar lebih aktif sebagai katalisator untuk memperkuat intermediasi perbankan. Salah satu bentuk programnya adalah penandatanganan Surat Perjanjian Kredit digunakan untuk percepatan program revitalisasi perkebunan dan penjaminan kredit UMKM. Pada perjanjian ini diberikan kredit sebesar Rp2,355 triliun bagi 18 debitor. Perjanjian kredit yang melibatkan empat bank ini, digunakan untuk percepatan program revitalisasi perkebunan yang mencakup 65.214 hektare (ha) dengan melibatkan 27.128 petani di Provinsi Jambi.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, BI membentuk Tim Fasilitasi (Task Force) Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) yang terdiri atas pemda, BI, dan Perbankan. Selain itu, asosiasi dan instansi/- lembaga terkait lainnya. Tim itu bertugas mendorong fungsi intermediasi perbankan dan mempercepat pemberdayaan sektor riil di daerah.¹³

¹² <https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebijkan-pemerintah>

¹³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, "BI Fasilitasi Pemberian Kredit," *Sindo*, 20 Juni 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Adapun program UMKM dan Bi terdiri dari program pengembangan UMKM dan sektor Rill dan program sosial bank Indonesia. Dengan memperkenalkan produk unggulan sehingga mengangkat citra budaya daerah, menciptakan lapangan kerja, mendorong pariwisata, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional, seperti memperluas pasardengan meningkatkan kualitas produk sesuai tren pasar, melalui WUJBI untuk menjadi ikon pariwisata yang menghadirkan produk-produk lokal untuk menjadi ikon oleh-oleh Kota Jambi.

Dalam hal ini Pemerintah provinsi jambi senantiasa berperan untuk bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam program pembinaan dan pengembangan UMKM, seperti salah satu contoh dalam memberikan pelatihan batik tulis 3 in 1 untuk mewujudkan dunia perindustrian di Kota Jambi. Karena Kota Jambi merupakan pusat kegiatan nasional di Provinsi Jambi maka, kerja sama pemerintah dengan BI menargetkan agar ekonomi kreatif bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Jambi.¹⁴ Melalui Dinas perdagangan, Dinas Koperasi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (dekranasda) untuk membina para pengrajin agar usaha para pengrajin dapat bertahan dan semakin berkembang, melalui Sinergi, Kreativitas, dan digitalitas sehingga terciptanya lapangan kerja dengan kesempatan dan peluang

¹⁴ <https://diskominfo.jambikota>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bagi UMKM untuk berkembang dan mengentaskan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Dalam rangka mendorong intermediasi perbankan kepada sektor riil dan UMKM, salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan menyediakan informasi data profil UMKM yang tidak sedang mendapatkan pembiayaan perbankan, namun membutuhkan kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan tersedianya data profil UMKM dimaksud, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi UMKM dalam rangka mempercepat akses pembiayaan dari perbankan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indikasi dalam sinergi pemerintah Kota Jambi dan Bank Indonesia untuk mewujudkan pembangunan di Kota Jambi, maka peneliti tertarik meneliti yang berhubungan dengan masalah yang dipaparkan tersebut dengan judul **“Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dibuat oleh penulis timbulah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi ?
2. Apakah ada faktor penghambat dari sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi?

¹⁵ <https://jambiprov.go.id/berita-launching-galeri-wirusaha-unggulan-jambi-pj-gubernur-dorong-pertumbuhan-umkm.html>

¹⁶ Bank Indonesia, “Profil UMKM Yang Potensial Dibiayai Oleh Perbankan,” diakses melalui alamat <https://www.bi.go.id/bisaid>, pada 20 Mei 2022.



C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini tidak melebar maka peneliti akan menfokuskan penelitian pada Sinergi Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam pembangunan dalam bentuk pemberdayaan UMKM di Kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari sinergi pemerintah kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap seluruh pihak-pihak yang bersangkutan dan terkait di dalam penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan teoritis

Ilmuan atau penulis esai sesuai menerima bahwa nantinya tes ini akan menjadi bahan untuk ditinjau dan sebagai jaminan untuk rencana yang sah untuk menyelesaikan strata satu program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Demikian pula, pencipta juga menerima bahwa itu biasanya akan digunakan sebagai sumber informasi dan



referensi bagi kalangan mahasiswa, dosen maupun orang lain yang membutuhkan informasi tentang Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangunan Kota Jambi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi pemerintah Kota Jambi dan Bank Indonesia dan pembangunan Kota Jambi. Dan memberikan gambaran tentang sinergi pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangunan Kota Jambi.

E. Tinjauan pustaka

Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan dalam penulisan. Adapun penelitian sejenis yang pernah dilakukan mengenai sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam mewujudkan pembangun Kota Jambi yaitu:

1. Yang pertama bernama Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo (2011) Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa analisis partisipasi dilakukan dengan membandingkan persentase kontribusi program lintas sector dan membandingkan peran stakeholder menurut permen Nakertrans No: KEP.214/MEN/V/2007 dengan realisasi dilapangan. Sinergitas dianalisis dengan cara membandingkan antara arahan masterplan, kebutuhan sinergi, dan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh masing-masing instansi. Selain itu, data juga dianalisis dengan metode triangulasi dari berbagai jenis dan sumber data untuk memperoleh hasil yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

komprehensif. Solusi atau saran kebijakan dirunut berdasarkan realisasi partisipasi, kebutuhan, serta kendala partisipasi yang difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan dipusat dan hinterland KTM. Jadi persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pembangunan.¹⁷

2. Yang kedua bernama Lusiana (2018) Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan Bank Indonesia yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan metode yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.¹⁸
3. Yang ketiga bernama Andi Riski Ananda AP (2020) Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan peran yang dilakukan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan

¹⁷ Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo 2011 *Sinergitas instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Jurnal Ketransmigrasian* Vol.28 no.2., hal.113-124

¹⁸ Lusiana Skripsi *Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi* 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

ekonomi yaitu melalui kebijakan moneter dengan menggunakan instrument BI Rate dan Sertifikat Bank Indonesia.¹⁹

Perbedaan penulisan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya hanya menjelaskan Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi. Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi. Sedangkan peneliti menulis bagaimana sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya memuat garis besar tentang kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penelitian, mulai dari penentuan jenis penelitian hingga tahap laporan.

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 tempat yaitu Kantor Walikota dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kota Jambi. Adapun objek dari penelitian ini ditekankan pada sinergi kedua lembaga tersebut dalam mewujudkan pembangunan di Kota Jambi. Disamping itu juga melibatkan aparat pemerintah Kota dan konsultan bank setempat guna mendapatkan informasi yang lebih kuat dan lebih akurat sehingga akan sangat membantu bagi penulis dalam membuat skripsi ini.

¹⁹ Andi Riski Ananda AP Skripsi *Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi* 2020.



2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, dan menggunakan analisis serta lebih melihatkan maknanya. Sementara itu metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian terjun secara langsung (seorang, Lembaga, masyarakat dan lain sebagainya) kepermasalahan tersebut, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau seagaimana adanya.²⁰

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data unit analisis berupa dokumentasi, obesrvasi dan *interview* yang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung.

Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber atau dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.²¹
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yaitu dengan melakukan kegiatan membaca, ,mengutip, mencatat buku-buku,

²⁰ Amaruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parana Ilmu, 2016), hlm. 98.

²¹ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2012), hlm. 49.

menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²²

4. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu merupakan suatu subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Aparat instansi pemerintah Walikota Jambi dan Instansi perwakilan Bank Indonesia Kota Jambi

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian Ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini Teknik yang digunakan adalah

a. Observasi

Observasi adalah perubahan, pemilihan, pencatatan serangkaian perilaku dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan empiris. Tetapi observasi disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan cara menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan . Maka peneliti mengamati secara langsung dilapangan. Objek penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi social dengan subjek penelitian, Teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami peristiwa yang terjadi dilapangan.

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 99





b. Wawancara

Metode yang digunakan penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan wawancara terstruktur ini peneliti memperoleh dan mengambil data dan tanya jawab secara langsung dengan responden dan mendengar langsung serta mencatat dengan teliti apa yang dijelaskan oleh responden, metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan.

Adapun informan yang diwawancarai peneliti dalam penelitian ini antara lain yaitu: Humas Pemda Kota Jambi, Humas Bank Indonesia Jambi dan Humas Kemendag Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²³ Dengan cara mencari data-data atau informasi di jurnal dan internet dan mengambil foto pada saat wawancara dengan responden saat berlangsung kemudian mendeskripsikan hasil wawancara tersebut sebagai bukti yang kuat bahwa peneliti sudah melakukan wawancara terjun ke lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu sebelum dilapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Penelitian ini menggunakan model analisis yaitu memproses data

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

display (penyajian data), data reduction (reduksi data) serta concluding drawing/verification (penarikan kesimpulan).

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah data dipilih peneliti akan mendeskripsikan dan menampilkan hasil dari penelitian tersebut. Penyajian data ini akan disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara langsung maupun secara tidak langsung.

c. Penarikan kesimpulan

Pada bagian akhir peneliti akan menarik sebuah kesimpulan peneliti harus sampai pada sebuah kesimpulan yang bisa dicerna oleh pembaca baik dari segi makna maupun hasil penelitian yang didapatkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Struktur hipotesis merupakan gambaran dari spekulasi yang dapat dimanfaatkan dan bagaimana melibatkan teori-teori tersebut dalam merekam suatu proklamasi eksplorasi. Dengan tujuan yang pasti dapat dibuat dan diselidiki lebih berputar dan di sekitar konsentrasi, para ahli menganggap itu penting digunakan. Selanjutnya struktur tersebut dapat dijadikan sebagai pembantu dan dapat dijadikan sebagai alasan mengingat untuk mendapatkan ide yang jelas dan tepat dalam penyusunan proposal ini.

1. Peran

Seokanto berpendapat bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peran.

Dalam peran, memiliki beberapa aspek didalamnya. Adapun aspek aspek dalam peran yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi dari seseorang atau baguan dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran variabel sebab akibat.

Dapat di istilahkan peran dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan sesuatu yang dapat diharapkan orang yang serta merta memiliki kedudukan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Sedangkan peranan merupakan sebuah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.

Dan kerangka pun bisa menjadi panduan serta bisa menjadi landasan berpikir untuk mendapatkan konsep yang benar dan jelas dalam penyusunan skripsi ini Kerangka teoripada penelitian ini antara lain:

2. Sinergitas instansi

Sinergi adalah Hubungan kerjasama antar individu atau kelompok agar mencapai tujuan yang sudah disepakati atau di tetapkan.

Menurut Deardorff dan Williams Sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan tapi suatu istilah yang berarti melipat gandakan pengaruh (Multiplier effect) yang memungkinkan pekerjaan atau jasa dan individu berlipat ganda secara esponensial melalui usaha Bersama.²⁴

²⁴ Noor Fatria As'ariany 2020 *Sinergi Antara Komisi Pemilihan Umum Dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dalam Pemutakhiran Data Kependudukan Dikota Banjarmasin* Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 4 No.3 hlm 25-26

Menurut Corning Sinergi sesungguhnya ada dimana-mana di sekitar kita termasuk di dalam diri kita. Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, batu dapat digunakan untuk membuat berbagai struktur seperti rumah, tembok, jalanan, dan sebagainya. Namun demikian, tanpa adanya semen dan usaha manusia maka batu-batu tadi hanya menjadi tumpukan batu belaka yang tidak banyak gunanya. contoh di atas menunjukkan betapa pentingnya sinergi. Tanpa ada sinergi dengan komponen yang lain maka komponen-komponen yang ada tidak dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar seperti yang diinginkan.

Sinergitas berasal dari kata sinergi, yang dapat disebut juga dengansinergisme ataupun sinergitas, menurut sarundajang sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat mengahsikan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan.

Menurut Covey sinergitas merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.²⁵

1. Konsep Sinergitas Instansi

Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

a. Komunikasi

Pertama komunikasi yang dilakukan dengan berorientasi pada sumber kegiatan guna mendapatkan tanggapan, kedua komunikasi yang berorientasi pada penerima melihat bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mencapai tujuan Bersama.

- 1) Hubungan langsung, bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- 2) Kesempatan awal, koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3) Kontinuitas, koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- 4) Dinamisme, koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

²⁵ Ibid 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 5) Tujuan yang jelas, tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6) Organisasi yang sederhana, memudahkan koordinasi yang efektif
- 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8) Komunikasi yang efektif, merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan.²⁶

Konsep sinergitas dalam pembangunan merupakan penggabungan dalam suatu proses interaksi, unsur atau kekuatan agar diperoleh hasil yang lebih besar, unsur atau kekuatan tersebut dimaksudkan untuk kebijakan, program dan kegiatan maupun dana dari masing-masing Lembaga terkait. Maka dalam pembangunan untuk mencapai hasil yang maksimal, tidak lepas dari sinergitas antar Lembaga maupun kebijakan program dan kegiatan. Dalam hal ini pola-pola atau upaya membentuk terobosan baru berupa ide-ide baru dalam berkomunikasi dan berkoordinasi yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian akan terbangun sinergitas yang lebih fleksibel dan mampu menyelesaikan masalah.

²⁶ Sinergitas *Stakeholders Dalam Inovasi Daerah* Jurnal Administrasi publik Vol.2 No.4

A. Kerangka Operasional

1. Perda & Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi tolak ukur dari berlangsungnya era baru otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah memang diarahkan untuk mendekatkan pemerintah (dari hasil pembangunannya) pada masyarakat yang dilayaninya. Otonomi daerah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Dampak perubahan tersebut, terdapat pada penyelenggaraan pemerintah sentralistik, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih desentralistik. Prinsip penyelenggaraan desentralistik adalah otonomi seluas-luasnya yang artinya daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan desentralisasi tidak saja mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi pada tingkat lokal, tetapi juga dalam aspek administrative yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.²⁷

Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

²⁷ Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.23 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.²⁸

2. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, social, budaya, politik yang berlangsung pada level makro(nasional) dan mikro(*community/grup*). Sehingga makna dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan(*progress*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan, berarti pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan dapat berupapengembangan/perluasan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.²⁹ Dalam hal ini pembangunan perkotaan sebaiknya mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

²⁸ W.Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2009) hlm.197

²⁹ http://bappeda.bulelengkab.go.id/indikator_pembangunan

sehingga dimaksudkan agar tetap mempertahankan apa yang telah dikembangkan dan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat bisa fokus dengan usaha yang dikelola. Hal ini dapat dicapai dengan upaya kerjasamadengan lembaga pemerintah dan pihak lainnya serta mengangkat aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu meraih peluang-peluang ekonomi dan pembangunan dimasa yang akan datang.³⁰

Adapun koordinasi dan kerjasama Bank Indonesia dan Pemerintah adalah Bank Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama dan koordinasi melalui beberapa Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian /Lembaga pemerintah dan bersama pemangku kebijakan yang lain, Bank Indonesia melakukan koordinasi pengembangan sektor riil dengan melakukan beberapa program pengembangan.

Pertama, dengan kementerian pertanian dengan mengembangkan kluster produk pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu melalui pengembangan infrastruktur keuangan, memberikan pengetahuan atau pemahaman pada pelaku usaha tani di bidang keuangan serta kemandirian dalam kegiatan usaha dan peningkatan kemampuan produksi untuk memberikan nilai tambah sesuai karakteristik produk.

KeduaBank Indonesia dan kementerian pertanian juga melakukan program pengembangan masyarakat dalam rangka peningkatan modal usaha dan kesejahteraan peserta program. Kedua, Bank Indonesiaa bekerja sama

³⁰ Indrajaya 2020 *Strategi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Perkotaan Kawasan Andalan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol 20 No. 1 hlm 113

dengan kemenkop-UKM mendirikan Lembaga-lembaga dan memberi konsultasi kepada UMKM. Dengan memberikan pendampingan UMKM dalam mengembangkan usahanya, khususnya melalui proses pelatihan peningkatan *skill* dan inovasi pengembangan produk, pengembangan pemasaran, dan peningkatan akses keuangan.

Ketiga, mendorong pelaksanaan sertifikasi lahan usaha mikro kecil yang merupakan program BPN. Dengan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, usaha mikro tersebut mempunyai jaminan yang diakui dalam proses pengajuan kredit perbankan. Keempat, mendukung program minapolitan yang bentuk oleh kementerian kelautan dan perikanan. Konsep tersebut merupakan sinergi atas seluruh potensi dan sumber daya yang meliputi produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu wilayah.³¹ Disini peran Bank Indonesia dalam mendukung program minapolitan berkaitan dengan peningkatan akses keuangan oleh pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Bank Indonesia juga bertindak sebagai mitra Kemenko Perekonomian dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan percepatan Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD). Pada program KUR selama ini telah menjadi andalan pelaku usaha mikro kecil karena proses penjaminan yang dibantu oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin. Dan PPKD di berbagai daerah juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah tersebut melalui peningkatan akses keuangan UMKM.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

³¹ Ibid 395

³² Ibid 396

3. Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menjelaskan bahwa Perbankan sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sistem perbankan sebagai lembaga perantara keuangan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi kekayaan dalam masyarakat, masalah kemiskinan serta eliminasi keadilan sosial.³³

Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka aturan pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara otentik sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi, sektor ini mampu tetap bertahan. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank.³⁴

³³ Septian Yudha Kusuma 2016 *Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Provitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia* Jurnal Bingkai Ekonomi Vol 1 No 2 hlm 10

³⁴ Muslimin Kara 2013 *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syari'ah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol.47, No.1 hlm.271-272

Disini Bank Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dan sangat strategi dalam membantu perkembangan UMKM, khususnya dalam bidang komoditi, tekstil, pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai macam usaha di sektor ekonomi lainnya. Program pengembangan UMKM bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bank Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga barang-barang. Salah satunya dengan membuat berbagai program untuk pengembangan UMKM. Program UMKM bank Indonesia terdiri dari program pengembangan UMKM dan sektor Riil dan program sosial bank Indonesia.³⁵

Adapun Peran Bank Indonesia dalam pengembangan sektor ril tidak lepas dari tujuan utama Bank Indonesia yaitu mencapai inflasi yang rendah dan terkendali. Stabilitas harga juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui pengembangan sektor riil. Upaya Bank Indonesia untuk turut mengembangkan sektor riil dapat membantu pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan seperti penimngkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, Bank Indonesia menggabungkan kebijakan moneter dengan beberapa strategi kebijakan lain termasuk pengembangan sektor riil khususnya UMKM³⁶. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan

³⁵ Lusiana *Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi* Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2018

³⁶ Ibid 393

peranan UMKM dalam perekonomian. Strategi pengembangan sektor riil dan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia diwujudkan dalam beberapa kegiatan.

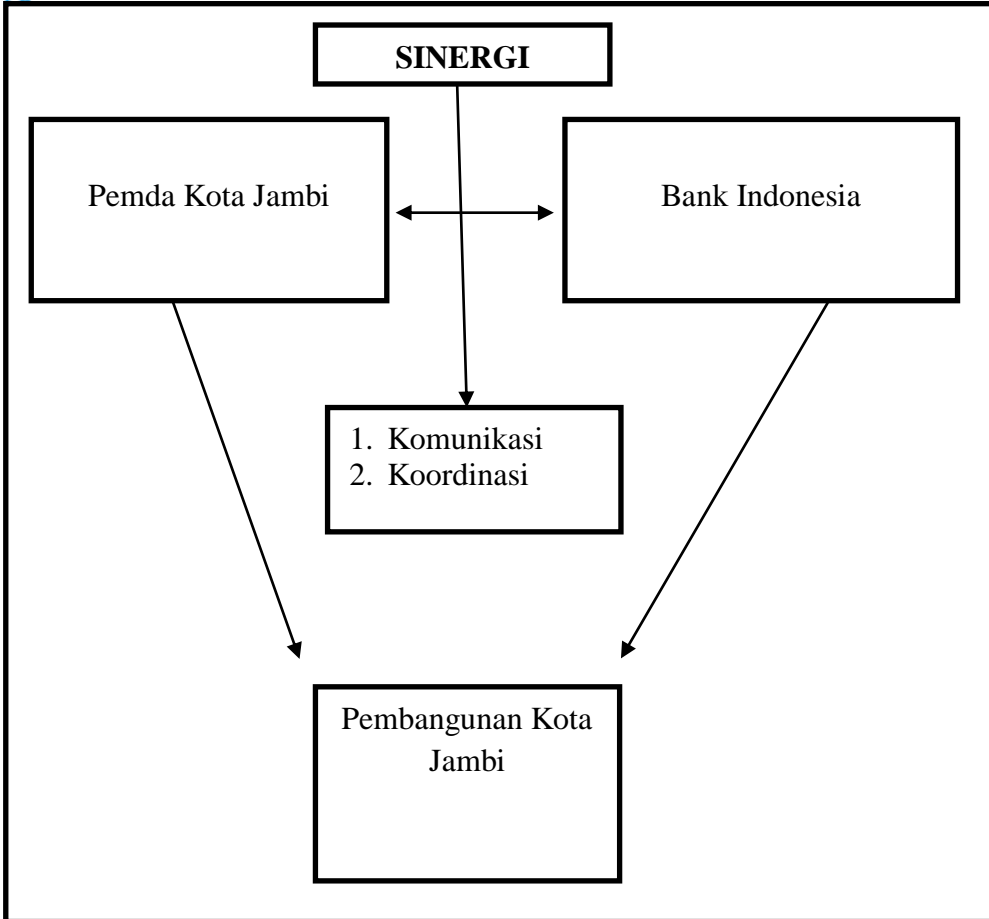
Pertama, dengan pengembangan klaster dan pengembangan bisnis, khususnya pada produk yang menunjang ketahanan pangan, meningkatkan ekspor dan pengalihan impor. Kedua dengan meningkatkan akses keuangan dengan program peningkatan kelayakan keuangan UMKM, penguatan infrastruktur keuangan dan fasilitas program pemerintah yang memberikan nilai tambah, seperti pendirian perusahaan penjamin kredit daerah, peningkatan kredit untuk UMKM, pemanfaatan sertifikasi hak atas tanah, dan pemanfaatan asuransi ternak sapi, skema resi Gudang, serta fasilitasi kredit program pemerintah. Ketiga meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga internasional melalui *memorandum of understanding*(MoU) dan mekanisme koordinasi lain.³⁷

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang peneliti gunakan dalam membuat skripsi ini menggunakan kerangka konseptual sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi. Kerangka konseptual tersebut peneliti sajikan dalam gambar berikut:

³⁷ Ibid 394

Gambar Kerangka Konseptual



Adanya interaksi antar dua stakeholders yaitu Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia untuk pembangunan Kota Jambi diperlukan adanya sinergi antar dua pemangku kepentingan tersebut. Sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.

Sinergitas antara Pemda Kota Jambi dan BI dapat terbangun melalui dua cara yaitu (a). Komunikasi dan Koordinasi. Pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu: Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan. Serta pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. (b). Koordinasi. Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Jambi

1. Kondisi Geografis

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41" Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi
- d. Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.³⁹

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9

³⁹BPS Kota Jambi, *Kota Jambi Dalam Angka 2021*, (Jambi: BPS Kota Jambi, 2021), hlm. 4.

Tahun 2013 seluas 175,53 KM². Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan,⁴⁰

2. Kondisi Demografis

Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 556.332 jiwa, dan terus meningkat menjadi 591.134 jiwa pada Tahun 2017. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Jambi berjumlah 606.200 jiwa.⁴¹ Adapun pertumbuhan penduduknya berkisar antara 1,29% sampai dengan 3,63% pertahun, dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,95%.⁴²

3. Kondisi Ekonomi

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat
- 2) Pengetahuan
- 3) Standar hidup layak.⁴³

⁴⁰ Pemda Kota Jambi, *RJPMD Kota Jambi 2018 - 2023*, (Jambi: Pemda Kota Jambi, 2013), hlm. 1.

⁴¹ BPS Kota Jambi, hlm. 70.

⁴² Pemda Kota Jambi, *RJPMD Kota Jambi 2018 - 2023*, hlm. 8.

⁴³ BPS Provinsi Jambi, "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2020", *Berita Resmi Statistik*, No. 05, Vol. XV, (2021), hlm. 2.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,41 poin meningkat menjadi 78,37 poin pada Tahun 2021 atau mengalami kenaikan 0,96 poin. Peningkatan indeks pembangunan manusia menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah maupun hidup layak semakin panjang.

b. Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Jambi masih beradapada angka yang masih tinggi yaitu 50.440 jiwa pada Tahun 2021 atau 8,32%. Dengan tingkat kemiskinan 8,32% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2019 tingkat kemiskinan berada pada angka 50.610 jiwa, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya.⁴⁴

c. Pengeluaran Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai pengeluaran per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai pengeluaran per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai pengeluaran sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah

⁴⁴BPS Provinsi Jambi, "Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribuan Jiwa), 2018-2020," diakses melalui alamat <https://jambi.bps.go.id/indicator/23/33/1/jumlah-penduduk-miskin-kab-kot.html>.

tersebut. Pengeluaran per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai pengeluaran per kepala atau per satu orang penduduk.⁴⁵

Nilai Pengeluaran per kapita Kota Jambi per bulan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.563.595 yang meliputi pengeluaran untuk makanan sebesar Rp.683.032 dan pengeluaran non-makanan sebesar Rp.880.562. pengeluaran masyarakat Kota Jambi dalam bulan dapat dikelompokkan pada kategori pengeluaran antara 300.000 – 499.999 rupiah hingga di atas 1.500.000.⁴⁶

B. Gambaran Umum Bank Indonesia Provinsi Jambi

1. Sejarah Singkat Bank Indonesia

Sebelum kedatangan bangsa barat, Nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perniagaan internasional yang digunakan oleh para pedagang yakni jalur darat dan jalur laut. Pada masa itu telah terdapat dua kerajaan utama di Nusantara yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan internasional yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Dalam maraknya perniagaan tersebut belum ada mata uang baku yang dijadikan nilai standar meskipun masyarakat telah mengenal mata uang dalam bentuk sederhana.⁴⁷

Sementara itu pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa sedang berupaya memperluas wilayah penjelajahannya diberbagai belahan dunia termasuk Asia dan Nusantara. Sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani (1453), penjelajahan tersebut dipelopori oleh Spanyol dan Portugis yang

⁴⁵Pemda Kota Jambi, *RJPMD Kota Jambi 2018 - 2023*, hlm. 14.

⁴⁶BPS Kota Jambi, *Kota Jambi Dalam Angka 2021*, hlm. 249.

⁴⁷ Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959.

kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris dan Prancis. Kegiatan penjelajahan tersebut telah mendorong munculnya paham merkantilisme di Eropa pada abad ke 16-17.⁴⁸

Selanjutnya pada akhir abad ke-18 revolusi industri telah berlangsung di Eropa. Kegiatan industri berkembang dan hasil produksi meningkat sehingga mendorong kegiatan ekspor ke wilayah Asia dan Amerika. Pesatnya perdagangan di Eropa memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang merupakan cikal bakal lembaga perbankan modern, antara lain seperti Bank Van Leening di Belanda. Kemudian secara bertahap bank-bank tertentu di wilayah Eropa seperti Bank Of England (1773), Riskbank (1809), Bank of Franch (1800) berkembang menjadi Bank Sentral.⁴⁹

Munculnya Malaka sebagai emporium perdagangan telah menarik perhatian bangsa Portugis yang akhirnya pada tahun 1511 berhasil menguasai Malaka. Mereka terus bergerak ke arah timur menuju sumber rempah-rempah di Maluku. Disana Portugis menghadapi bangsa Spanyol yang datang melalui Filipina. Beberapa saat kemudian bangsa Belanda juga berusaha menguasai sumber-sumber komoditi perdagangan di Jawa dan Nusantara. Dengan mengibarkan bendera VOC, mereka mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada tahun 1619. Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada tahun 1746 didirikan De Bank Van Leening dan kemudian berubah menjadi De Bank Courant en Bank Van Leening pada tahun 1752. Bank Van Leening merupakan Bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Pada akhir

⁴⁸ Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959.

⁴⁹ Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959.

abad ke-18, VOC telah mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan, maka kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan Janssen, Hindia Timur akhirnya jatuh ke tangan Inggris.⁵⁰

Ratu Inggris mengutus Sir Thomas Stanford Raffles untuk memerintah Hindia Timur namun pemerintahan Raffles tidak bertahan lama karena setelah usainya perang melawan Prancis (Napoleon) di Eropa, Inggris dan Belanda membuat kesepakatan bahwa semua wilayah Hindia Timur diserahkan kembali kepada Belanda. Sejak saat itu Hindia Timur disebut sebagai Hindia Belanda (Netherland Indie) dan diperintah oleh komisaris Jendral (1815-1819) yang terdiri dari Elout, Buyskes dan Van Der Capellen. Pada periode inilah berbagai perbaikan ekonomi mulai dilaksanakan di Hindia Belanda, hingga nantinya Du Bus menyiapkan beberapa kebijakan yang mempersiapkan didirikannya De Javasche Bank pada tahun 1828.⁵¹

Pada tahun 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank sebagai Bank Sirkulasi yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-Undang pokok Bank Indonesia yakni UU No. 11/1953 menetapkan bahwa Bank Indonesia didirikan menggantikan De Javasche Bank, bertugas untuk menjaga stabilitas rupiah, mengedarkan uang, memajukan perkembangan dan melakukan pengawasan urusan kredit.

Pada tahun 1968, diterbitkan Undang-undang Bank Sentral yakni UU No. 13/1968 yang melarang Bank Indonesia melakukan kegiatan komersial. Tugas

⁵⁰ Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959.

⁵¹ Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959.

tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia dimana UU No. 23 tahun 1999 menjadikan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen, single objective mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, melalui tiga tugas pokok, yakni: melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran dan pengawasan bank.⁵²

Pada tahun 2004 Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia termasuk penguatan Governance. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia.⁵³

Pada tahun 2011, dikeluarkan Undang-Undang baru yakni UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjelaskan bahwa fungsi pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan

⁵² Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959.

⁵³ Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945-1959.

sejak 31 Desember 2013 dan diganti dengan fungsi pengaturan dan pengawasan stabilitas sistem keuangan.⁵⁴

2. Visi dan Misi Bank Indonesia

a. Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets.

b. Misi Bank Indonesia

- 1) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- 2) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makro prudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikro prudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.
- 4) Turut mendukung stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia.
- 5) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambii

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambii

⁵⁴ www.bi.go.id diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

- 6) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- 7) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah.
- 8) Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.⁵⁵

3. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

a. Tujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.⁵⁶

⁵⁵ www.bi.go.id diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

⁵⁶ www.bi.go.id diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kota Jambi, dalam upayanya untuk menunjang pembangunan di daerah Kota Jambi, melakukan sinergi dengan merevitalisasi fungsi dan peran kantor BI di daerah agar lebih aktif sebagai katalisator untuk memperkuat intermediasi perbankan. Seperti sinergi dalam pemberdayaan dan permodalan UMKM. Membentuk tim Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) yang terdiri atas Pemda, BI, dan Perbankan. Sementara dalam hal pemberdayaan UMKM Pemda dan dan BI menginisiasi program pengembangan UMKM dan sektor Rill dan program sosial.

Pada bagian pembahasan tentang sinergi antara Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi Kota Jambi dan sektor UMKM, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan bagaimana lanskap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, khususnya perkembangan UMKM tiga tahun terakhir, kemudian membahas tentang sinergi antara Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia dalam pemberdayaan UMKM di Kota Jambi, dan terakhir membahas tentang kendala yang dihadapi dalam sinergi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi dan Pemberdayaan UMKM

1. Dasar Kebijakan Sinergi Antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam Pembagnunan Kota Jambi

Kata sinergi merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu synergy. Sebuah sumber menyebutkan kata ‘synergy’ berasal dari bahasa Yunani yaitu sunergos yang dalam Bahasa Inggris bermakna “working together” atau bekerja bersama dalam Bahasa Indonesia. Oxford Dictionary memaknainya synergy sebagai: “The interaction or cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects,” bila dibahasakan sebagai “interaksi atau kerja sama dari dua atau lebih organisasi, materi fisik, atau agen untuk menghasilkan sebuah efek gabung yang lebih besar daripada menjumlahkan masing-masing efek yang diciptakan oleh masing-masing organisasi atau materi fisik atau agen.”

Sumber lain, seperti Cambridge Dictionary, memaknai synergy sebagai “The combined power of a group of things when they are working together that is greater than the total power achieved by each working separately”, bila dibahasakan juga memiliki makna yang serupa di atas. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai sinergi, yang merupakan kata benda, sebagai kegiatan atau operasi gabungan.

Untuk menyederhanakan dalam memahami penerapan sinergi dalam pembangunan ekonomi Kota Jambi, maka sinergi dimaknai sebagai kerja sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

antar unsur, lembaga, atau kelompok yang berbeda, dalam hal ini Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia, yang sengaja diarahkan untuk saling mengisi dan melengkapi guna mencapai hasil yang lebih baik dibanding dikerjakan sendiri-sendiri.

Sejalan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana tujuan atau berbagai upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah harus bersinergi. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 bahwa sebuah sistem perencanaan pembangunan didesain guna menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah pusat dan daerah dan lain-lain atau dengan kata lain desain sebuah perencanaan menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara perencanaan menjelaskan bahwa agar sinergitas pembangunan atau sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan terjadi, maka perlu pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan masalah dan analisis isu strategis dan penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah. Kepentingan atau tujuan atau berbagai upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah atau antara pusat dan daerah harus bersinergi. Permendagri tersebut juga menjelaskan bahwa sinergi terjadi juga semenjak penyusunan rencana dengan pelibatan pemangku kepentingan dan ini sudah diamanatkan sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana seorang pimpinan daerah menyelenggarakan sinergi perencanaan antar unit-unit pemerintahan di bawah naungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

2. Perkembangan Ekonomi dan UMKM Kota Jambi

a. Perkembangan Ekonomi Kota Jambi

Pada hakikat, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Perkembangan ekonomi Kota Jambi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.⁵⁷

Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 29.815,11 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 821,05 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 30.636,17 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh penurunan produksi di seluruh lapangan usaha dan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemic COVID-19 serta adanya pembatasan aktifitas selama pandemi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 19.561,13 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 18.918,89 miliar rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020, Kota Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar minus 3,28 persen, menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,79 persen (2019). Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha.⁵⁸

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Jambi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil (31,85 persen); Industri Pengolahan (10,72 persen); Konstruksi (9,38 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (9,04 persen); Transportasi dan Pergudangan (8,68 persen) pada tahun 2020. Hal ini dapat

⁵⁷BPS Kota Jambi, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Tahun 2016-2020*, (Jambi: BPS Kota Jambi, 2021), hlm. 3.

⁵⁸BPS Kota Jambi, hlm. 54.

dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Jambi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Jambi pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, yaitu mencapai 31,85 persen (mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 31,17 persen).

Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,72 persen (mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 9,97 persen), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,38 persen (meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 9,15 persen). Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,04 persen (mengalami kenaikan sebesar 8,59 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,68 persen (mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 12,03 persen). Kelima lapangan usaha tersebut mengalami peranan yang berfluktuasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya (2019), pada tahun 2020 untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib cenderung meningkat. Sedangkan Lapangan usaha Industri Transportasi dan Pergudangan juga mengalami fluktuasi tapi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020.⁵⁹

⁵⁹BPS Kota Jambi, hlm. 55.

b. Perkembangan UMKM Kota Jambi

UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Jambi. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu, aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya.

Hasil pencacahan lengkap Sensus Ekonomi 2021-Listing menunjukkan bahwa usaha mikro lebih mendominasi dari sisi jumlah dibandingkan usaha kecil, yaitu mencapai 90 persen. UMKM khususnya usaha mikro mempunyai ciri jika tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Jenis barang/ komoditi pun tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Terkadang terjadi perubahan jenis aktivitas yang cukup cepat. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut, mayoritas UMK beroperasi secara komersil dalam waktu yang relatif tidak lama, yaitu kurang dari 10 tahun.⁶⁰

Sebagian besar UMKM di Kota Jambi memiliki karakteristik informal dan dikelola secara sederhana, yang sebagian dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum dan tidak adanya sistem pencatatan keuangan. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Dari data SE2021 Lanjutan, pengelolaan UMKM yang dilakukan

⁶⁰BPS Kota Jambi. *Potensi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Kota Jambi*, (Jambi: BPS Kota Jambi, 2021), hlm. 14.

secara sederhana, tercermin dari status badan hukumnya dan pencatatan laporan keuangannya.⁶¹

Jumlah UMKM di Kota Jambi mencapai 48,496 UMKM,⁶² yang terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 53,9 persen, sektor penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum sebesar 15,56 persen, sektor industri pengolahan sebesar 9,6 persen, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi sebesar 6,57 persen, sektor aktivitas jasa sebesar 3,46 persen, sektor pendidikan sebesar 3,1 persen, sektor real estate sebesar 1,99 persen.⁶³

Jumlah UMKM tersebut tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Jambi dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Jambi Timur yang berjumlah 7.084 UMKM. Diantaranya sebagai berikut: Kecamatan Jambi Timur 7,084 UMKM, Jambi Selatan 4,721 UMKM, Danau Teluk 2,323 UMKM, Danau Sipin 4,248 UMKM, Kota Baru 4,147 UMKM, Pasar Jambi 1,434 UMKM, Alam Barajo 5,189 UMKM, Jelutung 4,982 UMKM, Telanaipura 3,957 UMKM, Pelayangan 3,051 UMKM, dan Kecamatan Paal Merah 7,360 UMKM.⁶⁴ Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶¹BPS Kota Jambi, hlm. 21.

⁶²Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022.

⁶³Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022.

⁶⁴Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022.

Tabel 4.1

Data UMKM Kota Jambi 2021

No	Kecamatan	Rekapitulasi UMKM	Bidang Usaha				
			Kuliner	Fashion	Dagang / Industri	Jasa / Lainnya	Pertanian/ peternakan
1	Jambi Timur	7,084	2,963	11	3,064	846	200
2	Jambi Selatan	4,721	2,037	17	1,787	760	120
3	Danau Teluk	2,323	620	106	890	374	333
4	Danau Sipin	4,248	1,611	29	1,824	681	103
5	Kota Baru	4,147	1,454	8	1,863	673	149
6	Pasar Jambi	1,434	595	3	694	125	17
7	Alam Barajo	5,189	1,911	18	2,191	887	182
8	Jelutung	4,982	2,017	2	2,205	677	81
9	Telanaipura	3,957	1,527	32	1,534	601	263

10	Pelayanan	3,051	1,046	65	1,176	535	229
11	Paal Merah	7,360	2,806	16	2,667	1,476	395
JUMLAH		48,496	18,587	330	19,872	7,635	2,072

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 orang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 orang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ada sekitar 200 pelaku Umkm yang tersebar di sebelas kabupaten dan kota yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan bantuan sarana dan prasarana untuk usaha seperti gerobak jualan, blender, kompor gas, open, mesin spinner, alat penggoreng, mesin ekspreso, kualii, kukusan, mixer, bibit cabai ,bibit benih ikan, bibit bawang merah,. Wakil wali kota Jambi Maulana di jambi, mengatakan penyerahan bantuan ini selain bertujuan meningkatkan produktivitas UMKM, juga bagian yang tidak terpisahkan dari program dalam mengatasi inflasi.

Berdasarkan Hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mengenai sinergi Pemda Kota Jambi dan BI dalam pengembangan UMKM di Kota Jambi, yang menjadi lokasi penelitian terinci sebagai berikut: Jumlah UMKM yang mendapatkan binaan dari Pemda dan BI berjumlah 440 pelaku usaha. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Humas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi yang menjelaskan bahwa:

Untuk saat ini jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan dari bentuk kerjasama antara pihak Pemda dengan Bank Indonesia adalah 11 kelompok UMKM yang tersebar di 62 kelurahan, untuk masing-masing kelompok UMKM beranggotakan hingga 40 pelaku usaha bahkan lebih. Jadi dirata-ratakan maka jumlah pelaku usaha UMKM yang mendapatkan pinjaman modal usaha sekitar 440 pelaku usaha.⁶⁵

⁶⁵Wawancara dengan Humas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

Dari jumlah tersebut, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap UMKM binaan Pemda dan BI melalui teknik wawancara dengan sejumlah pemilik UMKM di kawasan Kota Jambi. Jumlah unit usaha tersebut terdiri dari pengelola unit usaha bidang makanan, minuman, dan jenis usaha lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap sejumlah pelaku UMKM di Kota Jambi, diperoleh data pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pendapatan UMKM Kota Jambi

No	Pendapatan (Per Bulan)
1	5 juta – 10 juta
2	11 juta – 20 juta
3	21 juta – 30 juta
4	31 juta – 40 juta
5	> 50 juta

Pada tahun 2020, Covid 19 melanda Kota Jambi, yang berdampak terhadap sektor ekonomi di Kota Jambi, salah satunya kegiatan ekonomi UMKM di Kota Jambi, terutama dalam pendapatan usaha UMKM. Beberapa pemilik UMKM di Kota Jambi yang menyediakan makanan dan minuman dapat memperoleh keuntungan lebih dari 1 kali lipat dari modal yang mereka putar untuk membeli bahan-bahan untuk makanan dan minuman, barang-barang jualan serta biaya operasional lain.

Pendapatan para pelaku UMKM di Kota Jambi dalam keadaan normal sebelum pandemi berkisar antara 5 sampai 10 juta per bulan untuk jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

UMKM jasa, 21 sampai 30 juta per bulan untuk jenis UMKM kuliner berbentuk kantin dan 31-40 juta jenis UMKM kuliner berbentuk rumah makan. Pendapatan ini berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah UMKM di Kota Jambi yang diteliti. Salah satunya pemilik usaha jasa yang menjelaskan bahwa:

Jumlah pengunjung selama pandemi mengalami penurunan selama pandemi. Pengunjung biasanya lebih banyak di hari libur dan hari libur nasional. Pada awal pandemi pendapatan kami mengalami penurunan tajam karena masyarakat yang lebih enggan untuk keluar rumah sehingga menyebabkan berkurang drastisnya pengunjung tempat pariwisata. Untuk pendapatan normal kurang lebih 6,5 juta tapi selama pandemi penghasilan turun tajam bahkan kadang dalam satu hari kami tidak mendapat penghasilan sama sekali.⁶⁶

Sementara UMKM kuliner lain berbentuk kuliner, memiliki pendapatan antara 21 juta sampai 30 juta per bulan. Pemilik UMKM kuliner menyampaikan bahwa:

Untuk modal usaha, kami memang menggunakan modal sendiri. Pendapatan normal mencapai Rp. 300.000-1.000.000 perhari, namun selama kebijakan PPKM paling hanya bisa mendapat penghasilan kisaran kurang dari Rp.50.000 per hari.⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan UMKM jasa di Kota Jambi pada masa sebelum pandemi berkisar antara 5 juta sampai 10 juta per bulan, sementara pendapatan UMKM kuliner berkisar antara 21 juta sampai 40 juta perbulan. Pendapatan ini dihasilkan dalam keadaan normal sebelum adanya pandemi Covid 19.

⁶⁶Wawancara dengan pemilik UMKM jasa pada tanggal 22 Agustus 2022.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Rd Hasanudin, selaku pemilik Kantin Bajang Ning

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selama pandemi COVID 19, hampir seluruh pemilik UMKM di Kota Jambi mengalami penurunan pendapatan dikarenakan daya beli konsumen yang menurun dan minimnya jumlah pengunjung serta aturan pemerintah.

Pendapatan UMKM di Kota Jambi pada masa pandemi sebelum pemberlakuan kebijakan PPKM berkurang drastis dibandingkan sebelum masa pandemi, namun sejak pemberlakuan PPKM kegiatan usaha UMKM terhenti sehingga berdampak pada tidak adanya pendapatan sama sekali selama 2 bulan, yaitu bulan Agustus dan September. Pendapatan UMKM jasa pada masa pandemi Covid 19 hanya 120.000 per minggu atau 480.000 per bulan. Pada masa PPKM, pendapatan selama 2 bulan sebesar 0 rupiah, karena jasa berhenti beroperasi sama sekali. Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik UMKM jasa yang mengatakan bahwa:

Usaha saya sempat berhenti selama lebih kurang 3 bulan akibat pandemi covid karena kebijakan lockdown dan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebelum ada PPKM, pendapatan dalam seminggu itu sekitar 120.000, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan uang bensin.⁶⁸

Pendapatan UMKM kuliner juga terdampak akibat Covid 19. Pada masa PPKM, pendapatan usaha kuliner di Kota Jambi hanya 50.000 per hari atau 1,5 juta per bulan. Sedikit lebih baik dibandingkan UMKM jasa yang berhenti total. Pemilik usaha kuliner menjelaskan bahwa:

Untuk modal usaha, kami memang menggunakan modal sendiri. Pendapatan normal mencapai Rp. 300.000-1.000.000 perhari, namun selama kebijakan PPKM paling hanya bisa mendapat penghasilan

⁶⁸Wawancara dengan pemilik UMKM Jasa pada tanggal 22 Agustus 2022.

kisaran kurang dari Rp.50.000 perhari.⁶⁹

Dampak Pandemi Pada UMKM di Kota Jambi sejak penerapan kebijakan PSBB dan PPKM tetap membawa dampak negatif bagi bagi pendapatan UMKM di Kota Jambi, hal ini disebabkan oleh dampak tidak langsung dari pandemi COVID 19. Dampak penurunan pendapatan paling signifikan dirasakan oleh UMKM jasa yang mengalami penurunan pendapatan saat pandemi hingga berhenti beroperasi selama masa PPKM.

Pandemi COVID 19 telah menyebabkan hilangnya pendapatan bagi UMKM di Kota Jambi. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah konsumen yang berkunjung. Sejumlah pelaku UMKM menyatakan bahwa COVID 19 membawa dampak yang buruk bagi jasa dan kuliner yang dijual. Karena banyak dari unit usaha yang tidak beroperasi pada masa PPKM atau beroperasi namun tidak ada penghasilan karena pengunjung yang sepi. Jumlah kerugian yang dirasakan berbeda-beda, tergantung pada jam operasi dan jumlah konsumen.

Dari sejumlah UMKM yang berhasil diwawancarai hanya sebagian kecil yang masih mengoperasikan unit usahanya pada masa pandemi dan bahkan menutup sementara kegiatan usahanya. Untungnya dua bulan terakhir dari September dan Oktober merupakan pemulihan kondisi ekonomi UMKM di Kota Jambi, karena jumlah konsumen yang kembali normal bersamaan dengan penghentian kebijakan PPKM.

⁶⁹Wawancara dengan pemilik UMKM kuliner pada tanggal 22 Agustus 2022.

3. Proses Sinergi Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia dalam Pembangunan Kota Jambi

Sinergi instansi adalah hubungan kerjasama antar individu atau kelompok agar mencapai tujuan yang sudah disepakati atau di tetapkan. Sinergi antar instansi dapat terbangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi.

a. Komunikasi Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin, *communicatus*, artinya berbagi atau menjadi milik bersama - mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Menurut webster New Collogiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku.

Komunikasi adalah proses yang diperlukan untuk membangun sinergi antara Pemda Kota Jambi dan bank Indonesia untuk pembangunan Kota Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap humas Pemda Kota Jambi. Penulis menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan berbagai media yang tersedia. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemda dan Bank Indonesia itu melalui beberapa cara, yang pertama komunikasi secara langsung yang dilakukan saat pertemuan dan pelatihan rutin yang dilakukan seminggu sekali dan untuk komunikasi yang tidak langsung dapat dilakukan melalui internet dengan memanfaatkan media sosial terutama whatsapp, dengan membuat grup whatsapp dan memberikan semua informasi terbaru melalui grup tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Humas Pemda Kota Jambi mengatakan bahwa kegiatan komunikasi langsung, dilakukan melalui acara pertemuan khusus dalam waktu tiga bulan sekali. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Dalam mengkomunikasikan tujuan pembangunan yang akan dilakukan, pihak Pemda memberikan informasi kepada pihak Bank Indonesia melalui pertemuan khusus yang diadakan sekali dalam tiga bulan, dalam pertemuan inilah Pemda menyampaikan bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pembangunan yang akan kita laksanakan.⁷¹

Menurut Humas Pemda Kota Jambi, tujuan komunikasi tersebut adalah untuk menyelaraskan antara tujuan Pemda Kota Jambi dalam pembangunan dan tujuan dari BI, hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Dalam mencapai tujuan pembangunan, pihak Pemda memberikan beberapa pilihan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, setelah diberikan beberapa pilihan, baru kita memperoleh jalan yang bisa kita tempuh dan menetapkan kesepakatan antara pihak Pemda dengan Bank Indonesia, dan kesepakatan tersebutlah yang akan dijadikan acuan dalam mewujudkan pembangunan tersebut.⁷²

Sedangkan komunikasi berbentuk sosialisasi yang dilakukan Pemda Kota Jambi dalam mengkomunikasikan rencana pembangunan terhadap pihak

⁷¹ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

⁷² Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

BI, dilakukan dengan cara menyampaikan rencana pembangunan dan upaya-upaya dalam melakukan pembangunan tersebut. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Dalam mensosialisasikan rencana pembangunan daerah Kota Jambi kepada Bank Indonesia yaitu dengan melakukan pertemuan antara pihak Pemda dengan Bank Indonesia tentang rencana yang telah disediakan dan bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam menjalankan rencana pembangunan tersebut, dalam pertemuan inilah semuanya dibahas dan disampaikan oleh pihak Pemda kepada pihak Bank Indonesia..⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dilakukan dengan berbagai media, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin dengan agenda 3 bulan sekali untuk membahas pembangunan Kota Jambi, termasuk sosialisasi program dan upaya-upaya mewujudkannya. Sementara komunikasi tidak langsung, secara umum dilakukan melalui media komunikasi seperti whatsapp dan grup khusus antara Pemda Kota Jambi dan BI.

b. Koordinasi Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi juga adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan

⁷³ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan tujuan koordinasi antara lain:

- 1) Meraih dan menjaga fektifitas organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronisasi, kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan diantara aktivitas yang saling bergantung/berkaitan.
- 2) Melakukan pencegahan terhadap timbulnya konflik serta menciptakan efisiensi yang optimal pada berbagai aktivitas yang interdependen melalui kesepakatan yang mengakomodinir seluruh elemen yang berkaitan.
- 3) Koordinasi berusaha untuk menciptakan dan menjaga agar suasana dan tingkah laku yang ada saling merespon dan mengantisipasi di setiap unit kerja baik yang berkaitan maupun tidak. Hal ini supaya kesuksesan setiap unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainnya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.

Koordinasi adalah proses yang diperlukan untuk membangun sinergi antara Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia untuk pembangunan Kota Jambi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap humas Pemda Kota Jambi. Penulis menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dilakukan dengan tujuan untuk menjalin kerja sama dengan cara pembagian tugas kerja. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak Pemda kepada pihak Bank Indonesia adalah dengan mengatur dan membagi pekerjaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akan diselesaikan dengan cara bekerjasama antara dua pihak yakni pihak Pemda dan juga pihak Bank Indonesia, pembagian ini bertujuan untuk memudahkan dan mengatur keseimbangan kerja yang akan dilaksanakan dalam tujuan mewujudkan pembangunan di Kota Jambi.⁷⁴

Humas Pemda Kota Jambi menambahkan bahwa kegiatan koordinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk pembagian tugas kerja agar fokus pada tugas masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan Kota Jambi. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dalam pembagian tugas kerja yang akan dilakukan oleh pihak Pemda dan juga pihak Bank Indonesia. Pembagian ini bertujuan untuk masing-masing pihak fokus kepada pekerjaan yang akan diselesaikan, sehingga tidak ada kesemrautan yang terjadi atas masing-masing tanggung jawab kerja. Sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan hasil kerja.⁷⁵

Saat ditanya mengenai pembagian tugas tersebut, Menurut Humas Pemda Kota Jambi, Pemda Kota Jambi berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan BI berperan sebagai lembaga penyalur modal dan stimulus pertumbuhan usaha masyarakat, sebagaimana hasil wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Dalam melaksanakan pembangunan kota, pihak bank daerah memiliki fungsi utama yaitu sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Berdasarkan fungsi utama bank daerah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada garis perintah

⁷⁴ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

dalam membangun koordinasi antara Pemda dan Bank Indonesia. Sementara itu bukan hanya sebagai penyedia dan penyalur modal usaha, pihak Bank Indonesia juga berperan dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui pelatihan rutin setiap minggunya. Dalam pelatihan ini jika ada kendala yang muncul terhadap usaha yang dimiliki oleh pihak pelaku UMKM Bank Indonesia juga akan memberikan bantuan berupa mencari jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.⁷⁶

Dalam prosesnya, koordinasi yang dilakukan oleh Pemda Kota Jambi dan BI, harus berjalan secara beiringan dan saling bersinergi. Hal tersebut dilakukan pada setiap sektor pembangunan, utamanya mengenai sinergi dalam ekonomi kerakyatan, yaitu UMKM. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Dalam pembangunan ekonomi koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemda adalah menyampaikan kepada tingkat kelurahan untuk membenrtuk kelompok UMKM yang akan diberdayakan oleh Bank Indonesia, dan alhamdulillah koordinasi ini berjalan sesuai rencana sehingga terbentuklah beberapa kelompok UMKM binaan yang akan diberdayakan oleh Bank Indonesia.⁷⁷

Tugas BI adalah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pada UMKM yang dinilai layak mendapat bantuan. Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa:

Dalam koordinasi dibidang permodalan, pihak Pemda memberikan kuasa sepenuhnya kepada tingkat kelurahan untuk mencari dan

⁷⁶ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

membentuk kelompok UMKM yang akan dibina, sehingga dalam pengorganisasiannya pihak kelurahan bertanggung jawab kepada Pemda, kemudian Pemda akan menyampaikan dan mengkoordinir kepada Bank Indonesia.⁷⁸

Tugas Pemda, sebagai pelaksana pembangunan ekonomi daerah, yang bersinergi dengan BI, diwujudkan dengan melakukan riset terhadap setiap UMKM yang layak mendapatkan bantuan permodalan, pendampingan dan pembinaan mulai dari tingkat kelurahan di Kota Jambi, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi yang menjelaskan bahwa:

Dalam pengorganisasian pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Pemda kepada Bank Indonesia adalah dengan memberikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari pihak kelurahan kemudian menyampaikannya kepada pihak Bank Indonesia.⁷⁹

Hasil koordinasi antara Pemda dan BI dalam pembangunan Kota Jambi, telah menghasilkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah, BI merilis jumlah UMKM yang layak dibiayai karena kinerjanya, berikut tabel jumlah UMKM yang layak dibiayai, sebagai hasil dari adanya sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI:

⁷⁸ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022..

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Parli, selaku pengguna sepeda, pada tanggal 15 Mei 2022.

Tabel 4.1

Data UMKM Di Kota Jambi Yang Potensial Menurut Bank Indonesia

Sektor Ekonomi	Jumlah UMKM
Industri Pengolahan	206
Jasa Pendidikan	4
Jasa Perorangan Yg Melayani RT, Keg Yg Menghasilkan Brg & Jasa Oleh RT Yg Digunakan Sendiri Utk Memenuhi Kebutuhan	7
Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	5
Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis	8
Kegiatan Jasa Lainnya	51
Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	7
Konstruksi	1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang, Pembuangan Dan Pembersihan Limbah Dan Sampah	7
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	43
Perdagangan Besar Dan Eceran Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	189
Perdagangan Besar Dan Eceran Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Sektor Ekonomi	Jumlah UMKM
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	81

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam upaya pembangunan Kota Jambi dilakukan dengan cara melakukan pembagian tugas antara masing-masing agar terjalin kerjasama dan tujuan yang bersinergi. Tugas BI sebagai hasil dari koordinasi tersebut adalah sebagai lembaga stimulus permodalan, pendampingan dan pembinaan UMKM, sementara tugas Pemda adalah melakukan riset terkait potensi dan kelayakan UMKM serta pengembangannya. Hasil dari koordinasi tersebut juga adalah dilansirnya sejumlah nama UMKM yang layak untuk dibiayai, dibina dan didampingi, yang berjumlah 618 UMKM untuk Provinsi Jambi.

4. Bentuk Sinergi Pemda Kota Jambi dan Bank Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Jambi

Sinergi antara Pemerintah Kota Jambi dan Bank Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi sektor UMKM Kota Jambi, menghasilkan sejumlah kebijakan dan program kegiatan. Diantaranya pembentukan struktur organisasi pemberdayaan UMKM di BI, pemberdayaan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan UMKM dan mengucurkan berbagai jenis bantuan pendanaan bagi UMKM sebagai upaya meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Beberapa jenis bantuan tersebut yang telah dikururkan baik kepada UMKM maupun kepada koperasi sebagai wadah dari UMKM di provinsi Jambi adalah:

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional

Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional adalah rangkaian kegiatan Pemerintahan yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi untuk mengembangkan usaha mikro anggota Koperasi dengan menggunakan dana bergulir konvensional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.

Tujuan Program adalah : (a) memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi, (b) meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan, (c) memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.⁸⁰

2. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah

Program bantuan pemerintah jenis ini merupakan perkuatan permodalan yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan aturansyariah. Dengan menggunakan pola ini dana perkuatan disalurkan melalui koperasi dan BMT dengan tujuan untuk membiayai ekonomi produktif. Sasaran Program adalah :

- a. Tersalurnya DBS dalam rangka perkuatan permodalan kepada 1 (satu) KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan.

⁸⁰ Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022, hlm 12.

- b. Tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanyayang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
- c. Terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKSyang memiliki usaha produktif.
- d. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKSdan peningkatan kemampuan manajemen usaha;

Secara umum tujuan dan sasaran dari program ini sama sajadengan program pembiayaan pada P3KUM konvensional.Perbedaannya terletak pada pola yang diterapkan dalam menyalurkan bantuan.⁸¹

3. Modal Awal Padanan (MAP)

MAP adalah bantuan pemerintah kepada UKM yang ada didalam sentra yang bersifat bergulir. Bantuan ini tidak disalurkan langsung kepada ukm,melainkan melalui koperasi simpan pinjam atau unit simpanpinjam sebuah Koperasi yang ada di dalam atau di dekatsentra. Besar dana map yang disalurkan adalah antara rp150.000.000,- hingga Rp 350.000.000,- per sentra.

Ide penyaluran dana melalui koperasi di wilayah sentra diharapkan memberikandua manfaat yaitu (1) dana disalurkan melalui pihak yang mengenal Daerah/pengusaha yang akan dibantu denganstandar penyaluran dana yang jelas dan (2) dana diharapkandapat membantu memperbaiki struktur permodalan KSP/USPkoperasi penyalur. Sementara itu, sasaran dari dana MAPadalah: (1) tersedianya dana MAP melalui KSP/USP koperasiyang melayani usaha kecil pada sentra/klaster usaha kecil yangditetapkan, dan (2) meningkatnya usaha bagi

⁸¹Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022, hlm 14.

sentra/klaster yang diindikasikan/USP koperasi. n dengan terjadinya perluasan jangkauan, peningkatan mutu pelayanan, dan kemampuan permodalan KSP.

Untuk mendapatkan dana MAP, suatu koperasi harus telah memiliki aktivitas setidaknya selama satu tahun, memiliki kinerja baik, jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 orang, belum mendapatkan bantuan sejenis serta melampirkan neraca rugi laba.⁸²

4. Program Perkuatan di Sektor Agribisnis

Tujuan program pengembangan pengusaha mikro dan kecil, melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektor agribisnis yaitu: (1) meningkatkan aktivitas dan pendapatan pengusaha mikro dan kecil melalui pelayanan simpan pinjam, (2) meningkatkan kemampuan dan jangkauan pelayanan KSP khususnya di sektor agribisnis, (3) meningkatkan kualitas sumber daya pengelola KSP, dan meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari KSP.

Untuk mendapatkan dana bantuan, KSP sektor agribisnis harus memenuhi syarat-syarat khusus sebagai berikut: (1) memiliki anggota minimal 100 (seratus) orang yang bergerak dibidang usaha produktif yang sejenis antara lain: Koperasi primer, petani, peternak, nelayan, produsen, dan perdagangan dalam bidang usaha agribisnis, (2) memiliki tunjangan macet maksimal 2%, (3) memiliki modal sendiri

⁸²Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022, hlm 16.

minimal sepertiga dari total aset, (4) memiliki fasilitas komputer, (5) predikat hasil audit terakhir adalah wajartanpa syarat.⁸³

5. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA)

Perkassa adalah program perkuatan permodalan koperasi usaha mikro yang disalurkan kepada para kaum perempuan. Target akhir dari program ini adalah meningkatkan kesempatan kerja dan berkurangnya angka kemiskinan.

Secara khusus tujuan dari program ini adalah:

- a. Memberdayakan perempuan pengusaha skala mikro,
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan berbasis syariah,
- c. memperkuat peran dan posisi KSP/USP dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Sedangkan sasaran dari program ini adalah:

- a. tersalurnya dana bergulir kepada perempuan yang memiliki aktivitas pada usaha mikro dan usaha produktif lainnya,
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi pengusaha mikro yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri kerajinan rumah tangga, warung, pedagang kecil termasuk perdagangan kaki lima,
- c. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan dan manajemen usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam,
- d. semakin kuatnya permodalan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam melalui pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya

⁸³Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022, hlm 17.

penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Untuk mendapatkan dana bantuan program PERKASSA, koperasi penerima harus memenuhi ketentuan-ketentuan antarlain: (1) telah memiliki badan hukum, (2) memiliki anggota paling sedikit 25 orang yang sebagian besar perempuan, (3) telah melakukan paling sedikit satu kali rapat RAT, dan (4) belum pernah menerima bantuan sejenis. Jika syarat tersebut terpenuhi barulah koperasi dapat mengajukan usulan kelayakan usaha kepada Dinas koperasi dengan persyaratan-persyaratan lainnya.⁸⁴

6. Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM)

Tujuan program itu meningkatkan kesejahteraan melalui kewirausahaan wanita serta mutu dan kinerja koperasi wanita. Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM) pada prinsipnya relatif sama dengan program P3KUM, hanya saja fokusnya adalah wanita. Tujuan Program adalah : (a) memberdayakan usaha mikro yang umumnya pelakunya adalah wanita melalui perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi, (b) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya wanita dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan, (c) memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi khususnya wanita dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.⁸⁵

7. Prospek MANDIRI

⁸⁴Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022, hlm 18.

⁸⁵Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022, hlm 19.

Program ini adalah program pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan pemerintah yang dapat diperluas dengan pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, yang dilakukan melalui pemberdayaan dan penyediaan fasilitas berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, dana bergulir dan dukungan bantuan perkuatan lainnya, kepada para sarjana dalam wadah koperasi, untuk melakukan kegiatan usaha pada berbagai bidang/ sektor usaha, dalam rangka menumbuhkan usaha baru (wirausaha baru) dan penciptaan lapangan kerja.

Tujuan program ini adalah:

- a. menciptakan usaha baru (wirausaha baru) yang mampu menciptakan kesempatan kerja, dan mengatasi masalah pengangguran, khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik;
- b. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian daerah;
- c. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif.

Sementara itu, sasaran dari program ini adalah:

- a. terwujudnya peserta Prospek Mandiri menjadi wirausaha baru, yang mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya;
- b. berkembangnya sektor-sektor usaha unggulan, pada daerah-daerah yang menjadi peserta Prospek Mandiri;

- c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasidan usaha kecil dan menengah.⁸⁶

5. Faktor Penghambat Dari Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam Mewujudkan Pembangun Kota Jambi

Faktor Penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor dan penghambat. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.

Adapun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti dari kata hambat yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh Pemda Kota Jambi dan BI dalam menjalin sinergi dalam pembangunan Kota Jambi, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

⁸⁶Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 2022, hlm 20.

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang atau organisasi. Menurut hasil wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi dan pihak BI, dalam pelaksanaan sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI hampir tak ada faktor internal yang menjadi kendala dalam menjalin sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Humas Pemda Kota Jambi yang mngatakan bahwa:

Dalam mejalin sinergi antara pihak Pemda dan Bank Indonesia yang menjadi kendala dalam proses pembangunan daerah ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Pemda maupun pihak Bank Indonesia. Baik kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal dari kedua belah pihak.⁸⁷

Dalam faktior internal ini, pihak Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa komunikasi antara Pemda dan BI berjalan dengan baik, tak ada faktor internal yang menjadi kendala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Humas Pemda Kota Jambi yang mngatakan bahwa:

Dalam menjalin komukiasi anantara pihak Pemda dan Bank Indonesia, sejauh ini tidak ada yang menjadi kendala, karena dalam pelaksanaannya, komunikasi yang dilakukan melalui beberapa cara yaitu baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada terjadi kendala dalam menjalin komunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya.⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

⁸⁸ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022..

Begitupun dalam hal koordinasi, Humas Pemda Kota Jambi menjelaskan bahwa tak ada kendala berarti dalam hal koordinasi antara pihak Pemda Kota Jambi dan BI. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Humas Pemda Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Secara umum yang menjadi kendala dalam pengkoordinasian antara Pemda dan Bank Indonesia itu tidak ada masalah, karena dalam menjalin komunikasi tidak ada kendala maka dapat dipastikan juga dalam pengkoordinasiannya tidak ada masalah. Karena masalah utama itu terjadi akibat komunikasi yang tidak baik, sejauh ini komunikasi yang terjalin itu baik dan tidak ada kendala yang dihasilkan dalam pengkoordinasiannya.⁸⁹

Hasil wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi tersebut juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan pihak BI yang mengatakan bahwa sinergi yang dibangun oleh BI dan Pemda Kota Jambi relatif tanpa kendala berarti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak BI yang mengatakan bahwa:

Dalam pembangunan ekonomi, komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak Pemda dan Bank Jambi sejauh ini sudah bagus, dan hasilnya begitu memuaskan, jadi dapat disimpulkan dalam koordinasi antara pihak Pemda dan Bank Indonesia tidak ada terjadi kendala.⁹⁰

Begitupula dalam hal koordinasi, menurut pihak BI, tak ada kendala internal dalam membangun koordinasi antara BI dan Pemda Kota Jambi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak BI yang mengatakan bahwa:

⁸⁹ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2022.

⁹⁰ Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam koordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemda dengan Bank Indonesia yang menjadi kendala adalah kurangnya partisipasi masyarakat pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan bantuan pinjaman modal dalam hal pelatihan yang diadakan dalam setiap minggunya, sehingga pemberdayaan yang dilakukan tidak berjalan dengan sempurna.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan Humas Pemda Kota Jambi dan pihak BI, dapat disimpulkan bahwa secara internal, tak ada kendala dalam membangun sinergi antara BI dan Pemda Kota Jambi untuk mewujudkan pembangunan Kota Jambi, baik dalam hal komunikasi maupun dalam hal koordinasi, karena relatif berjalan baik dan sesuai rencana.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu atau diluar organisasi. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk pihak-pihak terdekat terdekat di luar organisasi. Menurut hasil wawancara dengan pihak BI, dalam pelaksanaan sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI ada sejumlah faktor eksternal yang menjadi kendala dalam menjalin sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI untuk membangun Kota Jambi, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak BI yang mengatakan bahwa:

Dalam menjalankan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pihak Pemda dengan pihak Bank Indonesia dibidang ekonomi antara lain adalah banyak pihak pelaku usaha yang tidak bisa melunasi angsuran modal yang telah diberikan. Seharusnya permodalan yang dipinjamkan ini dapat diselesaikan dengan baik oleh pelaku usaha UMKM. Hal ini

⁹¹ Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022.

mengakibatkan kesenjangan yang terjadi antara pihak Pemda, Bank Indonesia dan Pelaku usaha UMK tersebut.⁹²

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Humas Pemda Kota Jambi yang menjelaskan bahwa kendala eksternal dalam hal menjalin sinergi antara BI dan Pemda Kota Jambi adalah faktor eksternal, yaitu masalah kredit macet yang dilakukan oleh pemilik UMKM. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Humas Pemda Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Terutama untuk pelaku UMKM yang merupakan binaan dari Sinergi Pemda dan Bank Indonesia, yang menjadi kendala utama dan permasalahan utama yang terjadi adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya banyak pelaku usaha yang tidak bisa melunasi angsuran kredit modal yang telah diberikan oleh pihak Bank Indonesia kepada pelaku usaha UMKM.⁹³

Dalam masalah permodalan terhadap UMKM, pihak BI menjelaskan bahwa kendala dominan dalam permodalan ini adalah masalah pada sisi UMKM itu sendiri, yaitu masalah kredit macet:

Dalam memberikan permodalan yang menjadi kendala bagi pihak Pemda dan Bank Indonesia adalah banyaknya kredit macet yang terjadi karena banyak pelaku usaha yang tidak mampu membayarkan angsuran permodalan yang telah dipinjamkan. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelatihan yang diadakan dalam setiap minggunya, selain itu banyak juga pelaku usaha yang abai dalam menjalankan tanggung jawabnya.⁹⁴

⁹² Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022.

⁹³ Wawancara dengan Humas Pemda Kota Jambi, pada tanggal 25 Juli 2022.

⁹⁴ Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Dalam masalah pelatihan dan pengembangan UMKM, pihak BI menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah masalah kurangnya partisipasi dari pemilik UMKM dalam program tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pihak BI yang mengatakan bahwa:

Dalam menjalankan pelatihan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemda dan Bank Indonesia yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelatihan yang diadakan, hal ini terjadi karena banyak pelaku usaha UMKM yang sibuk dengan urusannya sendiri sehingga melupakan kewajibannya yaitu kehadirannya dalam menghadiri pelatihan dan perkembangan UMKM ini.⁹⁵

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut, pihak BI menjelaskan bahwa, penindakan tegas terhadap pelaku UMKM yang mengalami kredit macet dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pihak BI yang mengatakan bahwa:

Solusi yang kami pihak Pemda dan Bank Indonesia lakukan adalah dengan menindak tegas para pelaku UMKM agar meningkatkan partisipasinya dalam acara pelatihan dan pengembangan usaha yang akan diberdayakan. Sehingga pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan pinjaman akan ikut andil dalam pelatihan dan pengembangan yang dilakukan, sehingga tercipta pemberdayaan yang merata diantara masing-masing kelompok pelaku UMKM tersebut.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022.

⁹⁶ Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022.

Sejalan dengan pihak BI, pihak Pemda Kota Jambi juga menegaskan bahwa solusi yang diambil untuk mengatasi kendala rendahnya partisipasi pemilik usaha adalah dengan melakukan sosialisasi, dorongan dan penindakan terhadap pelaku UMKM bersangkutan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Humas Pemda Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Dalam menerapkan solusi tersebut contoh yang dapat saya berikan adalah dengan mengirmkan pesan kepada pelaku usaha UMKM yang tidak ikut berkontribusi dalam acara pelatihan dan pengembangan ini, jika telah dikirimkan pesan, ternyata pelaku masih tidak ikut dalam acara pelatihan tersbut, maka kami akan meberikan arahan kepada beliau dengan mendatangi rumah pelaku usaha tersebut. Hal ini perlu kami lakukan karena dalam pelatihan dan pengembangan UMKM tersebut kami akan memberikan solusi jika ada kendala yang dirasakan oleh pihak pelaku UMKM, sehingga konstrubusi pelaku UMKM dalam pelatihan dan pengembangan ini sangat penting bukan hanya untuk pelaku saja namun juga bagi pihak kami dalam menjalankan pemberdayaan yang berlangsung.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam membangun sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI. Secara internal, segala proses dalam komunikasi dan koordinasi antara Pemda Kota Jambi dan BI relatif berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Sedangkan dari faktor eksternal, hambatan utama dalam sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI adalah adanya kendala pada eksternal dari

⁹⁷ Wawancara dengan Humas BI pada tanggal 26 Juli 2022.

pelaku UMKM dalam hal kredit macet dan kurangnya partisipasi dalam pelatihan, pembinaan dan pengembangan UMKM oleh pihak BI.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi terbangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi. Dalam proses komunikasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dilakukan dengan berbagai media, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sedangkan proses koordinasi yang dilakukan antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam upaya pembangunan Kota Jambi dilakukan dengan cara melakukan pembagian tugas antara masing-masing agar terjalin kerjasama dan tujuan yang bersinergi. Tugas BI sebagai hasil dari koordinasi tersebut adalah sebagai lembaga stimulus permodalan, pendampingan dan pembinaan UMKM, sementara tugas Pemda adalah melakukan riset terkait potensi dan kelayakan UMKM serta pengembangannya. Hasil dari koordinasi tersebut juga adalah dilansirnya sejumlah nama UMKM yang layak untuk dibiayai, dibina dan didampingi, yang berjumlah 618 UMKM untuk Provinsi Jambi.

2. Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam membangun sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI. Secara faktor internal, segala proses dalam komunikasi

dan koordinasi antara Pemda Kota Jambi dan BI relatif berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Sedangkan dari faktor eksternal, hambatan utama dalam sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI adalah adanya kendala pada eksternal dari pelaku UMKM dalam hal kredit macet dan kurangnya partisipasi dalam pelatihan, pembinaan dan pengembangan UMKM oleh pihak BI.

6. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini mengenai Sinergi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam pembangunan Kota Jambi. Diharapkan pada Pemda Kota Jambi dan BI agar membuat mekanisme pengembangan UMKM dengan memberikan permodalan tanpa sistem kredit. Hal ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab pemerintah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan juga bagi masyarakat pelaku UMKMyang telah melakukan permodalan dengan skema kredit, agar menjalankan tanggungjawab sebagaimana yang telah diembankan. Sedangkan dalam hal kurangnya partisipasi pelaku UMKM dalam pelatihan, pembinaan dan pengembangan UMKM, maka diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amaruddin, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Parana Ilmu, 2016
- BPS Provinsi Jambi, *Potensi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Provinsi Jambi*, Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2017.
- BPS Provinsi Jambi, *Potensi Usaha Mikro Kecil Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Jambi*, Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2017.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta 2017
- Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri, *Sistem Ekonomi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- M.Juhro Solikin, *pengantar kebanksentralan Teori dan Kebijakan*, Depok:Rajawali Pers,
- Onan Marakali Siregar Dkk, *Penerapan Bisnis Model Canvas Sentral UMKM*, Medan: Purpantara, 2020.
- Rachmawan Budiarto Dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung: Alfabeta 2009
- W.Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

B. Peraturan Perundang-Undangan

DPR RI. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Jakarta: DPR RI, 2004.
Kemendagri. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Jakarta: Kemendagri, 2004
Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

C. Skripsi dan jurnal

Anwar Gandi Skripsi *Strategi Untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Jambi Menghadapi Revolusi 4.0.* 2019

Arif Laksana, *Analisis Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Covid 19 Di Kota Jambi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,*” Jambi: UIN Jambi, 2021.

Mariana Kristiyanti 2012 *Peran Strategi Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional* Jurnal Ilmiah Informatika Vol.3 No.1

Sinergitas *Stakeholders Dalam Inovasi Daerah* Jurnal Administrasi publik Vol.2 No.4

Noor Fatria As'ariany 2020 *Sinergi Antara Komisi Pemilihan Umum Dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dalam Pemutakhiran Data Kependudukan Dikota Banjarmasin* Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 4 No.3

Indrajaya 2020 *Strategi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Perkotaan Kawasan Andalan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan,* Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol 20 No. 1

Septian Yudha Kusuma 2016 *Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Provitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia* Jurnal Bingkai Ekonomi Vol 1 No 2

Muslimin Kara 2013 *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syari'ah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol.47, No.1

Lusiana *Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi* Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2018

Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo 2011 *Sinergitas instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Jurnal Ketransmigrasian* Vol.28 no.2

Andi Riski Ananda AP Skripsi *Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi* 2020.

D. Website

[Teori dan indikator pembangunan](http://bapeda.bulelengkab.go.id)<http://bapeda.bulelengkab.go.id>.

<https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebijakan-pemerintah>


<https://diskominfo.jambikota>

Lampiran 1

SURAT BUKTI RISET

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-365 /D.II.1/PP.00.11/6/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 28 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

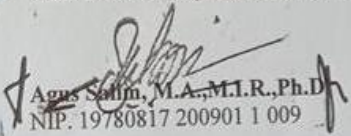
Nama : **Ambar Palupi**
NIM : 105180118
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi.**

Lokasi Penelitian : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Jambi
Waktu Penelitian : 28 Juni 2022 – 28 Agustus 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-3 647/D.II.1/PP.00.11/6/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 28 Juni 2022

Kepada Yth.
Bapak Walikota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Ambar Palupi
NIM : 105180118
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Sinergi Pemerintah Kota dan Bank Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi.

Lokasi Penelitian : Kantor Walikota Jambi
Waktu Penelitian : 28 Juni 2022 – 28 Agustus 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran II

DATA INFORMAN

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Handow Tubagus	Manager Bank BI	1
2	Drs Kurnain	Kasi PPU dan Perlindungan UMKM	1
3	Pandu	Humas PEMDA	1
4	Sutrisno	Pemilik UMKM Kuliner	1
5	Firman	Pemilik UMKM Kantin	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran III

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana kerjasama antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam mewujudkan pembangunan di Kota Jambi?
2. Dalam program apa saja Pemda dan BI bekerjasama dalam pembangunan Kota Jambi?
3. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi, bagaimana bentuk kerjasama Pemda dan BI?
4. Berkaitan dengan permodalan UMKM, bagaimana kerjasama antara Pemda dan BI?
5. Bagaimana komunikasi antara Pemda Kota Jambi dan BI dalam mewujudkan pembangunan di Kota Jambi?
6. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemda Kota Jambi pada BI dalam mewujudkan pembangunan di Kota Jambi?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemda dan BI dalam menjalin sinergi dalam pembangunan daerah?
8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemda dan BI dalam menjalin sinergi dalam pembangunan ekonomi di Kota Jambi?
9. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemda dan BI dalam menjalin sinergi dalam pembangunan UMKM di Kota Jambi?
10. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran IV

Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran V

Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti membuat jadwal penelitian agar mudah melangsungkan tahap-tahap penelitian.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	September- Oktober 2021				Januari-Mei 2022				Juni-Juli 2022			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Interview dan Observasi												
2	Studi Literatur												
3	Pengumpulan Data												
4	Analisis Data												
5	Pembuatan Laporan												

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE



Identitas Diri

Nama : Ambar Palupi

Tempat/Tanggal Lahir : Daya Murni, 23 Juli 1999

Email : ambar29@gmail.com

Telepon/Wa : 082268056960

Alamat : Desa Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Nama Ayah : Sukarman

Nama Ibu : Ida Nurwati

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Nurul Huda

2. SD : SDN 138// Daya Murni

3. SMP/MTs : MTS/N Daya Murni

4. SMA/MA : SMAN 1 Pelepat Ilir Bungo

5. UIN STS Jambi 2022 : S1 Ilmu Pemerintahan